

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda pembangunan berkelanjutan dunia yang ditandatangani oleh 193 kepala negara pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan” yang terdiri dari 17 tujuan Pembangunan. Berikut akan disajikan gambar tujuan-tujuan dari pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

*Sumber : Bappenas (2018)*

Pembangunan sektor pariwisata saat ini menjadi fokus utama, dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan minat wisatawan dan partisipasi langsung masyarakat lokal, serta menjaga stabilitas lingkungan untuk jangka panjang. Pariwisata berfungsi sebagai salah satu alat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan. Sektor pariwisata berperan penting dalam mendukung SDG 8.9 yaitu tujuan SDGs

ke 8 mengenai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta target ke 9 yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Oleh karena itu, intervensi dan konsistensi dari pemerintah diperlukan pada tata kelola kepariwisataan.

Salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi pilar ekonomi masa depan adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata merupakan sektor industri yang memiliki peluang besar dan pengaruh signifikan dalam mendukung perekonomian Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, sehingga minat kunjungan pun tinggi. Terlihat dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang banyak datang ke Indonesia dari tahun 2021 ke tahun 2022. Berikut akan disajikan data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut kebangsaan.

**Tabel 1. 1 Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2021-2022**

Negara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Kunjungan)	
	2021	2022
ASEAN	528226	2408098
ASIA	904841	1426388
TIMUR TENGAH	5639	81834
EROPA	55906	960410
Negara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Kunjungan)	
	2021	2022
AMERIKA	25073	260095
OCEANIA	35504	722524
AFRICA	2341	29682
GRAND TOTAL	1557530	5889031

*Sumber : BPS (2022)*

Apabila ditinjau berdasarkan tabel 1.1 di atas, jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2021 sebesar 1.557.530 menjadi 5.889.031 pada tahun 2022. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan secara optimal, terfokus, dan profesional dengan tujuan untuk membangun dan memanfaatkan potensi pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. (BULETIN APBN, 2016) dalam (Paradise Purba et al., 2021).

Sektor pariwisata juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Nizar, 2011). Dorongan ini muncul karena pariwisata memiliki keterkaitan (*linkages*), baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sejumlah industri lain dalam perekonomian. Sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata antara lain adalah agen perjalanan, operator wisata, hotel serta restoran, sedangkan yang bersifat tidak langsung antara lain adalah dengan sektor perbankan, perusahaan asuransi, transportasi, budaya, dan layanan lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perjalanan dan pariwisata.

Seiring berjalannya waktu, perubahan kecenderungan berwisata pada saat ini diakibatkan oleh munculnya kejenuhan wisatawan untuk mengunjungi kawasan wisata buatan dan pada akhirnya melahirkan suatu minat wisata menjadi konsep baru berwisata yang dikenal dengan wisata pedesaan (*desa wisata*) (Mustabsirah, 2015). Desa wisata merupakan sektor yang relatif penting dari industri pariwisata di beberapa negara Eropa (Dorobantu & Nistoreanu, 2012). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 yang mana

disebutkan bahwa pengelolaan desa wisata yang menggunakan pendekatan kepariwisataan berkelanjutan akan memberikan nilai tambah. Pada berbagai aspek, tidak pada aspek ekologis dan sosial budayanya saja, tetapi juga dapat memberi nilai tambah pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar desa. Menurut data dari BPS, Indonesia sendiri memiliki 83.843 desa/kelurahan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke pada tahun 2021. Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan desa/kelurahan terbanyak di Indonesia dengan jumlah 8.562 desa/kelurahan. Hal tersebut ditunjukkan oleh data sebagai berikut.

**Tabel 1. 2 Provinsi dengan Jumlah Desa/Kelurahan Terbanyak Tahun 2021**

No.	Provinsi	Jumlah	Presentase
1.	Jawa Tengah	8.562	10,21%
2.	Jawa Timur	8.496	10,13%
3.	Aceh	6.516	7,77%
4.	Sumatera Utara	6.132	7,31%
5.	Jawa Barat	5.957	7,10%

*Sumber : BPS (2021)*

Jumlah total desa/kelurahan di Indonesia yaitu sebanyak 83.843. Adapun provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah dengan 8.562 desa/kelurahan dengan presentase sebesar 10,21%. Posisi kedua terdapat Provinsi Jawa Timur dengan 8.496 desa/kelurahan dengan presentase sebesar 10,13%. Kemudian, Aceh dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak ketiga yaitu 6.516 desa/kelurahan dengan presentase sebesar 7,77%. Pada posisi keempat terdapat Sumatera Utara dengan 6.132 desa/kelurahan dengan

presentase sebesar 7,31%. Selanjutnya pada posisi kelima adalah Jawa Barat dengan 5.957 desa/kelurahan dengan presentase sebesar 7,10%. (Lihat tabel 1)

Menurut Damanik (dalam Andriyani, 2017), pengembangan pariwisata wilayah pedesaan didorong oleh tiga faktor penting. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang masih alami dan karakteristik masyarakatnya yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang sudah sejak lama mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan perkotaan. Kedua, kondisi fisik alam dari pedesaan masih alami dan belum banyak tersentuh oleh perubahan fisik seperti di perkotaan. Ketiga, dalam tingkatan tertentu, wilayah perkembangan wilayah pedesaan dinilai lambat, sehingga dalam pengembangan wisata ke depannya bisa lebih menitikberatkan pada pemanfaatan potensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.

Upaya mengembangkan potensi desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan pengembangan desa wisata. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang gencar dalam melakukan pengembangan pariwisata pedesaan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata. Desa dipandang sebagai miniatur dari sebuah negara, dimana di dalamnya terjadi kegiatan pembangunan serta pemberdayaan secara mandiri, kondisi ini sangat sesuai dengan salah satu Nawacita dari Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan menguatkan pembangunan desa-desa yang ada.

Desa wisata dapat memberikan kebebasan bagi masyarakat setempat untuk mengelola desanya sesuai dengan potensi yang ada. Program desa wisata ini merupakan program yang dibentuk pemerintah yang secara langsung melibatkan peran masyarakat setempat. Desa wisata juga sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nuryanti (dalam Sidiq, et.al, 2017) menyebutkan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk keintegrasian dari atraksi, akomodasi, dan penyediaan fasilitas pendukung yang keberadaannya merupakan satu kesatuan dari adat maupun norma sosial masyarakat yang berlaku.

Pembangunan desa wisata memiliki manfaat antara lain dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat desa, mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, sehingga mampu memutar roda perekonomian yang ada di desa tersebut, mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan menerapkan pelatihan dan pendampingan, mampu mengenalkan kearifan budaya dan adat istiadat kepada wisatawan tanpa mengubah kebudayaan tersebut serta mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana desa, sehingga mendukung pariwisata di desa tersebut. Pengalaman dan kepuasan yang diharapkan oleh wisatawan cukup tinggi, termasuk lingkungan, sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun keseimbangan agar kita tidak hanya membangun pariwisata, tetapi bagaimana pariwisata dapat berkembang. Lingkungan pedesaan diharapkan mampu menciptakan rasa selalu ingin kembali ke tempat tersebut.

Pengembangan pariwisata melalui desa wisata di Jawa Tengah merupakan sektor yang juga sedang dikembangkan. Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas, baik berupa karakter fisik

lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan. Dasar hukum mengenai Desa Wisata di Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dimana dalam peraturan daerah ini pengembangan desa wisata meliputi pengembangan infrastruktur desa wisata, pemasaran desa wisata, penguatan kelembagaan desa wisata, dan kerjasama kemitraan. Pemerintah Kabupaten Semarang juga mendukung keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ini yaitu dengan berupaya dalam mengembangkan desa wisata. Selain itu, Kabupaten Semarang juga memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2020-2025.

Kabupaten Semarang merupakan daerah dengan jumlah desa wisata terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukkan oleh pendataan jumlah desa wisata tahun 2018 menurut kabupaten/kota. Dari 229 desa wisata yang terdata, Kabupaten Semarang merupakan kabupaten/kota dengan desa wisata terbanyak yaitu 30 desa wisata. Adapun desa wisata yang sedang dikembangkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Semarang salah satunya adalah Desa Wisata Lerep. Desa Lerep merupakan desa yang memiliki banyak potensi alam dan kearifan lokal yang layak untuk dikembangkan. Maka dari itu, pemerintah setempat melakukan sebuah pendekatan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam membangun kesadaran dan melek terhadap potensi desa yang mempunyai manfaat besar dalam kehidupan masyarakat. Desa Wisata Lerep memiliki banyak potensi wisata diantaranya Curug



Pencapaian strategi dalam rangka pengembangan Desa Wisata Lerep tentunya membutuhkan kerja sama dan kontribusi dari para *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata harus dilaksanakan dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, sehingga diharapkan dapat mewujudkan Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan melalui kerja sama dan peran yang seimbang tersebut.

Apabila ditinjau dari pengembangan Desa Wisata Lerep terdapat permasalahan salah satunya terkait dengan peran Pemerintah Desa Lerep yaitu Kepala Desa dan perangkat desa dalam hal penyediaan fasilitas pada Curug Indrokilo begitupula dengan loket yang belum berfungsi dengan baik. Kondisi Curug Indrokilo sangat memprihatinkan serta tidak terawat dengan baik, sehingga potensi wisata Desa Lerep ini kurang diminati oleh pengunjung. Sarana prasarana yang dibutuhkan seperti batas pengaman, tempat beristirahat, dan juga warung belum tersedia (Hidayah et al., 2024). Peningkatan fasilitas menjadi salah satu strategi pengembangan Desa Wisata Lerep, tetapi dalam hal penyediaan fasilitas masih kurang optimal.



Gambar 1. 3 Kondisi Sekitar Curug Indrokilo

*Sumber : Dokumentasi Peneliti (2024)*

Selanjutnya, masyarakat Desa Wisata Lerep sebagai pengurus Pokdarwis di bawah naungan BUMDES Gerbang Lentera memiliki peran sebagai pelaksana kegiatan pariwisata. Penguatan kelembagaan Pokdarwis menjadi salah satu strategi dalam pengembangan pariwisata. Namun, lemahnya kelembagaan masih terjadi dalam dua Pokdarwis yang ada di Desa Wisata Lerep. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam susunan organisasi Pokdarwis Indrokilo Mulyo dan Pokdarwis Soka Ceria belum sesuai dengan ketentuan kelembagaan desa wisata yang tertulis dalam Buku Pedoman Desa Wisata oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Berikut akan disajikan tabel struktur organisasi pokdarwis yang ada di Desa Wisata Lerep.

**Tabel 1. 3 Struktur Organisasi Pokdarwis-Pokdarwis di Desa Wisata Lerep**

No.	Nama Pokdarwis	Struktur Organisasi
1.	Pokdarwis Rukun Santoso	Pelindung, Penasihat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Sie. Daya Tarik Wisata, Sie. Kuliner dan Souvenir, Sie. Humas dan Marketing, Sie. Acara, Sie. Seni dan Budaya, Sie. Perlengkapan, Sie. Keamanan, Sie. Transportasi, Sie. Multimedia

No.	Nama Pokdarwis	Struktur Organisasi
2.	Pokdarwis Indrokilo Mulyo	Pelindung, Penasihat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota
3.	Pokdarwis Soka Ceria	Pelindung, Penasihat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota

*Sumber : Data diolah penulis (2023)*

Selain itu, Pokdarwis Indrokilo Mulyo dan Pokdarwis Soka Ceria terbilang masih kurang dalam pengadministrasian dan koordinasi. Pengadministrasian yang kurang optimal dilihat dari Pokdarwis tersebut tidak melakukan pendataan jumlah kunjungan wisatawan, berbeda dengan Pokdarwis Rukun Santoso yang telah melakukan pendataan jumlah wisatawan, yaitu pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan di Pokdarwis Rukun Santoso sebanyak 7.095 orang. Kemudian, terkait dengan kurangnya koordinasi dapat terlihat dari minimnya pengadaan rapat koordinasi dari Pokdarwis Indrokilo Mulyo dan Pokdarwis Soka Ceria apabila dibandingkan dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokdarwis Rukun Santoso yang sudah dihadiri oleh banyak pengurus. Berikut data mengenai rapat koordinasi pokdarwis dan jumlah pengurus yang hadir.

**Tabel 1. 4 Rapat Koordinasi Pokdarwis dan Jumlah Pengurus yang Hadir pada Juli – September Tahun 2023**

No.	Nama Pokdarwis	Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Jumlah Pengurus yang Hadir
1.	Pokdarwis Rukun Santoso	19 Juli 2023 : Rapat Koordinasi (Persiapan dan koordinasi tamu mancanegara serta agenda santunan anak yatim)	25 orang
		26 Juli 2023 : Rapat Koordinasi (Sosialisasi inovasi paket, latihan bahasa Inggris dan pembagian kaos POKDARWIS)	20 orang

		8 Agustus 2023 : Rapat Koordinasi (Persiapan acara lomba kemerdekaan, laporan progress pembangunan, perbaikan administrasi, sosialisasi dari KKN)	16 orang
		29 Agustus 2023 : Rapat Koordinasi (Laporan pembangunan dan koordinasi kegiatan)	15 orang
		15 September 2023 : Rapat koordinasi (Laporan pembangunan, evaluasi kegiatan POKDARWIS, persiapan <i>launching</i> )	20 orang
2.	Pokdarwis Indrokilo Mulyo	Belum mengadakan rapat koordinasi	-
3.	Pokdarwis Soka Ceria	Belum mengadakan rapat koordinasi	-

*Sumber : Data diolah peneliti (2023)*

Peran masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pariwisata terbilang kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kendala yang dihadapi oleh Pokdarwis Indrokilo Mulyo dalam hal ini yaitu sulitnya mencari masyarakat yang tertarik dalam pengembangan pariwisata. Pokdarwis Indrokilo Mulyo saat ini sedang dalam tahap penggalan potensi wisata alam baru berupa curug, tetapi dalam prosesnya menemui kendala yaitu sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dimana hanya berjumlah 4 orang yang ikut dalam kegiatan kerja bakti dari 856 penduduk di Dusun Indrokilo yang tercatat pada tahun 2022.

Kemajuan desa wisata tentunya perlu didukung dengan peran *stakeholders* yang baik. Berbagai *stakeholders* yang terlibat diharuskan untuk saling mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan strategi guna mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Namun, berdasarkan uraian sebelumnya, peran *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Lerep masih menemui kendala, sehingga dalam

pelaksanaan strategi juga mengalami hambatan. Hal tersebut dapat berdampak pada belum tercapainya tujuan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis *stakeholders* berdasarkan perannya pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang. Hal tersebut dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian mengapa peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep belum optimal? sehingga penelitian Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang penting untuk dilakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang
2. Menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang

3. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk membantu mempelajari masalah dan memberikan perspektif tentang kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang difokuskan pada pengembangan pariwisata dengan teori peran *stakeholders*.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah terkait dengan kondisi peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep, sehingga diharapkan pemerintah dapat memperluas jaringan dan mempererat seluruh *stakeholders* yang terlibat.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan peran *stakeholders*, sehingga diharapkan masyarakat dapat terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan perannya, demi mewujudkan Desa Lerep ke arah yang lebih baik, mengingat dalam pengembangan desa wisata sangat dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat itu sendiri terhadap usaha dan program pemerintah.

### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran *stakeholders*, sehingga diharapkan peneliti dapat menganalisis dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan nyata berdasarkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.

## 1.5 Kerangka Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber dari hasil penelitian sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi peneliti. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penting bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam analisis penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti akan mendeskripsikan secara singkat penelitian terdahulu berdasarkan kesamaan topik yang digunakan sebagai berikut:

Penelitian yang membahas mengenai peran *stakeholders*, diantaranya yang pertama berjudul Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Siwang Paradise di Desa Siwang Kota Ambon karya Fanny Sospelissa dan Billy Seipalla pada tahun 2021. Teori yang digunakan ialah teori *stakeholder* dari Maryono (2005). Menurut teori dari Maryono, *stakeholders* dapat dibedakan menurut tiga kelompok, yaitu : *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan objek

siwang paradise adalah aktor kunci (pemilik kawasan) dan aktor utama (masyarakat sekitar). Kendala dalam pengelolaan di objek siwang adalah karena belum adanya *trust* dalam diri pemilik kawasan untuk melibatkan *stakeholders* pendukung yang dalam hal ini adalah swasta, LSM, dan akademisi.

Penelitian kedua yaitu berjudul Analisis Peran Aktor dalam Pengembangan Obyek Wisata Umbul Susuhan di Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten oleh Shendy Yasmin Arafat, Budi Puspo Priyadi, dan Amni Zakarsyi pada tahun 2022. Teori yang digunakan ialah teori dari Maryono (dalam Handayani, 2017) yang terdiri dari *stakeholders* primer, *stakeholders* kunci, dan *stakeholders* sekunder/pendukung. Selain itu juga menggunakan Teori peran *stakeholders* dari Nugroho (2014) (dalam Handayani, 2017) yang mengkategorikan *stakeholders* menjadi lima, yaitu *policy creator*, koordinator, implementor, fasilitator, dan akselerator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan utama dalam pengembangan obyek wisata Umbul Susuhan adalah BUMDes Mahanani, yang berperan sebagai pembuat kebijakan, pelaksana, dan koordinator. Selanjutnya, terdapat dua pemangku kepentingan kunci dalam pengembangan ini yaitu Pemerintah Desa Manjungan, yang berperan sebagai pembuat kebijakan, koordinator, dan fasilitator; serta Dispermasdes Kabupaten Klaten, yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator. Selain itu, pemangku kepentingan sekunder dalam pengembangan ini meliputi

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan Ngawen, pihak swasta yang berperan sebagai fasilitator, serta BPD, Ketua RW, Ketua RT, PKK, dan Karang Taruna yang berperan sebagai akselerator. Teori peran *stakeholders* dari Nugroho juga digunakan pada penelitian yang berjudul Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang karya Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, Kismartini pada tahun 2022. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. *Policy Creator* : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah.
2. Koordinator : Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung, Kelurahan Nongkosawit, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang.
3. Fasilitator : Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang, Kelurahan Nongkosawit, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Jawa Tengah.

4. Implementor : Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang.
5. Akselerator : Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung, Universitas Negeri Semarang, Wisatawan Desa. Wisata Nongkosawit dan masyarakat Nongkosawit.

Faktor pendorong internal dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit adalah keinginan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung untuk terus berinovasi dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi wisata di Desa Wisata Nongkosawit, keramahan masyarakat, serta potensi yang ada di desa tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah lokasi desa yang dekat dengan Universitas Negeri Semarang, yang dapat mendukung perkembangan desa wisata. Faktor penghambat internal dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata yang masih sangat rendah. Selain itu juga belum ada kemitraan atau kerjasama secara legal.

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul karya Riesti Triyanti, Indah Susilowati tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori klasifikasi *stakeholder* menurut Maryono (2005) yang membagi *stakeholders* menjadi *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder. Identifikasi para pihak menunjukkan terdapat 12

pihak yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul. Kedua belas *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 6 *stakeholders* primer, 3 *stakeholders* kunci, dan 3 *stakeholders* sekunder.

Penelitian berikutnya oleh Beny Setiawan dan Herbasuki Nurcahyanto pada tahun 2020 berjudul "Analisis Peran *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu: Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang menunjukkan bahwa pemangku kepentingan kunci adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang, yang berperan sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, akselerator, dan koordinator. Pemangku kepentingan utama adalah Tenaga Kesehatan (Bidan), yang berperan sebagai fasilitator, pelaksana, dan koordinator, serta IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan, dan FKK yang juga berperan sebagai fasilitator, pelaksana, dan koordinator. Pemangku kepentingan sekunder terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, keluarga, institusi pendidikan, dan dunia usaha, yang masing-masing berperan sebagai fasilitator.

Penelitian selanjutnya berjudul *Analisis Stakeholder* pada Pengembangan Desa Wisata Batu Layang Kabupaten Bogor oleh Ining Latianingsih, Christina L Rudatin, dan Meisa Sofia pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori yang digunakan adalah Teori *stakeholder* yang digunakan yaitu dari Eden &

Ackerman (1998) yang membagi *stakeholders* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, yaitu : *key players, context setters, subject, crowds*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi *stakeholders* berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. *Key players* : Pengelola Desa Wisata Batu Layang, Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Bogor.
2. *Context setters* : Kemenparekraf, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Jawa Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor, Pemerintah Desa Batu Layang, Polsek Cisarua & Koramil Cisarua-Megamendung.
3. *Subject* : Pemerintah Kecamatan Cisarua, PNJ.
4. *Crowds* : Masyarakat, Podomoro University, Media.

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul Kolaborasi dan Sinergitas Antar *Stakeholder* dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata di Kebun Raya Cibinong karya Mahardhika Berliandaldo, Achmad Chodiq, Driszal Fryantoni. 2021. Hasil identifikasi *stakeholder* menunjukan pengelompokan ke dalam dua konteks yaitu *stakeholder* primer yang terdiri dari LIPI dan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta *stakeholder* sekunder yang terdiri dari Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab. Bogor, Mitra Pengelola Kebun Raya, dan Pelaksana TJSL Kab. Bogor. Untuk mendukung keberhasilan dalam pengembangan pariwisata, maka dilakukan analisis peran dari masing-masing *stakeholder*. Hasil analisis menunjukan para *stakeholder* terbagi kedalam empat kategori analisis

peran berdasarkan kepentingan dan Pengaruh, yakni sebagai *subjects*, *key player*, *crowd*, dan *context setters*. Pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* dapat mempercepat proses pembangunan sektor pariwisata yang dilakukan di Kebun Raya Cibinong.

Selanjutnya yaitu Peran *Stakeholders* dalam Pemberdayaan di Kampung Pelangi oleh Hardi Warsono, Ade Putri Febriandini, Sultan Arief Azlansyah, Arfan Zulkan Sipayung pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori Pentahelix dari Herwan (2016) yang terdiri dari : pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitian berupa analisis *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pemberdayaan di Kampung Pelangi Kota Semarang adalah Akademisi, Masyarakat, Pemerintah, Swasta, Media Massa.

Pihak akademisi berperan dalam penggalian dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh Kampung Pelangi. Sementara masyarakat berperan dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengelolaan fasilitas di Kampung Pelangi dengan pengarahannya oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang beranggotakan masyarakat itu sendiri. Sedangkan Pemerintah berperan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan Kampung Pelangi, hingga pada tahap evaluasi. Selain itu, terdapat pihak swasta yang berperan dalam *supporting program*. Adapun faktor penghambat berupa belum adanya sarana promosi *online* tersendiri, sehingga belum ada informasi khusus mengenai Kampung Pelangi untuk

menjual produk unggulan yang dimiliki. Ketersediaan fasilitator yang terlatih juga masih dianggap kurang memadai, karena pemerintah tidak menyediakan fasilitator tersendiri untuk pengembangan Kampung Pelangi.

Penelitian selanjutnya yaitu Peran *Stakeholder* dalam Pembangunan Pariwisata di Pulau Samosir. Feronica Simanjorang, Luchman Hakim, dan Sunarti pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori dari Yoeti (2013) yang menjelaskan bahwa Produk wisata yang menjadi dasar pengembangan komponen pariwisata, yaitu : atraksi, amenities, aksesibilitas. Selain itu juga menggunakan teori dari Pitana & Gayatri (2005) yang mengelompokkan *stakeholder* menjadi pemerintah, pelaku usaha/swasta, dan masyarakat. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan hasil dimana Peneliti belum menemukan adanya hubungan kerja sama yang kuat diantara pemerintah, masyarakat lokal, dan swasta dalam membangun pariwisata Pulau Samosir. Masyarakat lokal memilih untuk mengelola sumber daya pariwisata khususnya situs budaya secara mandiri. Kondisi yang sama juga ditemui dalam sektor pariwisata dimana aktivitas bisnis masih belum berjalan dengan strategi pengelolaan yang tepat.

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau karya Riska Destiana, Kismartini, Tri Yuniningsih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata halal Pulau Penyengat melibatkan *stakeholders* dengan konsep pentahelix, terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa.

Terdapat 38 *stakeholders* yang terlibat dan diklasifikasikan ke dalam *stakeholders* primer, kunci dan sekunder. Peran *stakeholders* tercermin dalam peran *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator. Hubungan antar *stakeholders* dilihat dari bentuk dan aktivitasnya. Nilai dan komunikasi menjadi faktor pendukung dalam pengembangan destinasi pariwisata halal, serta kepercayaan dan kebijakan menjadi faktor penghambatnya.

Dengan adanya penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran mengenai fenomena penelitian yang menjadi acuan bagi penelitian penulis terkait dengan peran *stakeholders*. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa analisis peran *stakeholders* dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang adalah penelitian baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Adapun pada penelitian yang akan dilakukan tersebut tidak hanya meneliti peran *stakeholders* saja, tetapi juga mengidentifikasi aktor yang terlibat serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang.

## **1.5.2 Kajian Pustaka**

### **1.5.2.1 Administrasi Publik**

Administrasi didefinisikan oleh Herbert Simon (dalam Marliani, 2019) sebagai aktivitas dimana kelompok saling bekerja sama untuk

mencapai tujuan bersama. Menurut Pasolong (Marliani, 2019) Administrasi mencakup dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur yang melekat padanya. Dimensi karakteristik administrasi meliputi efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien melalui tindakan yang rasional.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014) Administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diatur dan dikoordinasikan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik mengelola berbagai hal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, peran administrasi publik menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Administrasi publik adalah disiplin ilmu sosial yang terus berkembang seiring perubahan zaman, peradaban, dan teknologi. Peningkatan tuntutan masyarakat dapat menghasilkan ide-ide baru untuk pengembangan administrasi publik dalam penyelenggaraan negara.

Nicholas Henry dalam (Yuniarso et al., 2014) mengemukakan definisi administrasi publik merupakan integrasi antara teori dan praktik dengan tujuan untuk lebih memahami bagaimana pemerintah berhubungan dengan masyarakat yang dipimpinnya serta untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

David H Rosenbloom (dalam Ayu Pangestuti & Maesaroh, 2018) yang tertulis di *Journal of Public Policy and Management Review* menjelaskan bahwa administrasi publik mengaplikasikan teori-teori dan praktik-praktik manajemen, politik, dan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan legislasi dan eksekutif pemerintah dalam mengelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Ini merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan publik dengan memperbaiki aspek-aspek seperti organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Menurut Syafiie (dalam Azizah et al., 2023) poin-poin Administrasi Publik diantaranya adalah :

1. Administrasi Publik adalah bentuk kerja sama dalam lingkungan pemerintahan.
2. Administrasi Publik meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif, yudikatif serta keterkaitan diantara mereka.
3. Administrasi Publik memiliki peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, sehingga merupakan sebagian dari proses politik.

Dari penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu bentuk koordinasi, sinergitas, ataupun kerjasama antar berbagai *stakeholders*, terutama ketika pemerintah menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.

### 1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan atau pergeseran paradigmanya. Kuhn (dalam Keban, 2014) menjelaskan bahwa paradigma adalah suatu kerangka pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau cara penyelesaian masalah yang dianut oleh masyarakat ilmiah dalam periode waktu tertentu. Ketika suatu paradigma menghadapi krisis, kepercayaan terhadap kerangka pandang tersebut mulai menurun, mendorong masyarakat untuk mencari pandangan baru yang lebih sesuai dengan kondisi saat itu. Dalam konteks ilmu administrasi publik, krisis paradigma ini menghasilkan pergeseran dari paradigma lama menuju yang baru.

Menurut Kuhn (1970) mendefinisikan paradigma adalah sudut pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau strategi untuk menyelesaikan masalah yang dianut oleh masyarakat ilmiah dalam waktu tertentu. Bogdan & Biklen menyampaikan bahwa paradigma adalah gabungan dari asumsi-asumsi, konsep-konsep, atau proposisi logis yang terkait satu sama lain dan mempengaruhi cara berpikir serta penelitian. Pergeseran paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry (dalam Astuti et al., 2020) adalah sebagai berikut :

1. *The Politics Administration Dichotomy* (1900 – 1926)

Asumsi utama dari paradigma “*The Politics Administration Dichotomy*” yakni politik dan fungsi pemerintahan harus dipisahkan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Woodrow

Wilson mempromosikan pemikiran ini dalam esainya “*The Study of Administration*” yang diterbitkan di *Political Science Quarterly* tahun 1897. Woodrow Wilson menyatakan bahwa terdapat empat persyaratan administrasi publik yang efektif, yaitu : (a) pemisahan antara politik dan administrasi, (b) analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta, (c) meningkatkan efisiensi dengan praktik dan sikap yang mirip dengan bisnis terhadap operasi harian, dan (d) meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri serta mendorong penilaian berdasarkan prestasi. Paradigma ini memberikan landasan yang kuat terhadap teori administrasi publik. Selain itu, paradigma ini memberikan orientasi ilmiah dengan berusaha membedakan antara “fakta” dan “nilai”.

## 2. *The Principles of Administration* (1927 – 1937)

Paradigma kedua “*The Principles of Administration*” membahas tentang prinsip-prinsip administrasi. Buku karya W. F. Willoughby “*Principles of Public Administration*” yang diterbitkan pada tahun 1927 merupakan awal dari paradig ini. Selain itu, beberapa karya lain yang menonjol adalah “*Creative Experience*” oleh Mary Parker Follett, “*Industrial and General Management*” oleh Henry Fayol, “*Principles of Organization*” karya James D. Mooney dan Alan C. Riley, dan tujuh prinsip administrasi (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) dalam buku “*Paper on the Science of Administration*” karya Luther H. Gulick dan Lyndall F adalah karya

yang paling dikenal. Paradigma kedua berpusat pada prinsip-prinsip administrasi yang dianggap dapat diterapkan pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial dan budaya.

3. *Public Administration as Political Science* (1950 -1970)

Paradigma yang ketiga “*Public Administration as Political Science*”, digambarkan oleh Henry (dalam Astuti et al., 2020) sebagai paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Henry melihat keinginan kuat dari ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik ke dalam bidang ilmu politik. Pada saat yang sama, ilmuwan manajemen juga semakin berupaya untuk mengklaim administrasi publik ke dalam bidang ilmu manajemen. Pada saat itu, paradigma ini mengimplementasikan upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi. Oleh karena itu, sebagai hasil dari perubahan dan pembaruan, administrasi kembali ke induk ilmunya, yaitu ilmu politik.

4. *Public Administration as Management* (1956 - 1970)

Henry menetapkan paradigma ke empat “*public administration as management*” atau administrasi publik sebagai manajemen. Periode ini sebagai kemenangan para ilmuwan manajemen untuk membawa administrasi publik menjadi bagian dari ilmu manajemen. Prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya terus dikembangkan secara ilmiah dan lebih mendalam. Pada paradigma ketiga dan keempat, dua disiplin keilmuan yaitu politik dan manajemen

bersaing menempatkan diri paling berhak mengakui bagian keilmuan dari administrasi publik.

5. *Public Administration as Public Administration* (1970 – sekarang)

Pada tahap ini, administrasi publik diakui sebagai disiplin ilmu yang otonom. Mereka menemukan bahwa hierarki menjadi perhatian utama dan birokrasi telah beralih ke pasar dan organisasi sektor swasta. Dengan kata lain terdapat perpindahan dari model administrasi publik tradisional ke model NPM. Paradigma ini menegaskan bahwa administrasi publik adalah bidang ilmu independen yang memiliki teori, istilah, objek, dan pendekatan sendiri. Ilmu kebijaksanaan, politik ekonomi, pembuatan kebijakan dan analisis, serta metode pengukuran telah menjadi hal yang diperhatikan dalam ilmu administrasi publik. Aspek perhatian paradigma ini menghubungkan mata rantai antara fokus dan lokus administrasi publik. Fokusnya adalah teori organisasi, praktik analisis kebijakan publik, teknik administrasi, dan manajemen. Kemudian untuk lokusnya adalah persoalan publik (*public affairs*).

6. *Governance* (1990 – sekarang)

Paradigma yang terakhir adalah “*governance*”. Tamayao (dalam Astuti et al., 2020) mendefinisikan *Governance* sebagai Pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara adalah sebuah proses kompleks di mana berbagai sektor masyarakat memegang peran dalam menetapkan dan menyebarkan kebijakan publik, yang secara langsung mempengaruhi masyarakat serta

perkembangan ekonomi dan sosial. Istilah "*governance*" digunakan untuk menggambarkan dasar dari pemerintahan modern yang berbeda dengan tradisi pemerintahan. Proses politik ini melibatkan partisipasi luas dari warga negara dan kelompok masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (Ikeanyibe, 2016) dalam (Astuti et al., 2020).

*Governance* melibatkan kerja sama dengan sektor lain untuk menyediakan layanan, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan arahan. Secara keseluruhan, *governance* melibatkan delegasi pelayanan (seperti desentralisasi atau pembagian kekuasaan dan fungsi) kepada jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta, atau pemerintahan di tingkat yang lebih rendah. (Ewalt, 2001) dalam (Astuti et al., 2020). Pada dasarnya, "*governance*" melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yang terdiri dari organisasi masyarakat, warga lokal, serta sektor publik ataupun swasta (Gibson, 2011) dalam (Astuti et al., 2020).

Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma keenam atau paradigma *governance*. Paradigma ini menekankan terciptanya interaksi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah, serta menekankan hal-hal seputar mekanisme dan proses yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang terlibat diizinkan untuk menunjukkan kepentingannya serta saling berkolaborasi.

### 1.5.2.3 Kebijakan Publik

William N. Dunn dalam (Pasolong, 2022) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Bidang-bidang ini mencakup pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Thomas R. Dye dalam (Pasolong, 2022) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pemerintah harus memiliki alasan untuk melakukan sesuatu, sehingga bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat saja.

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 7 menjelaskan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hierarki mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai kepada tingkat negara.

Para ahli membagi pembuatan kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam (Setiawati, 2020) yaitu :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Para pembuat kebijakan kemudian membahas masalah yang telah masuk agenda kebijakan. Masalah didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan terbaik. Pemecahan ini berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, salah satunya dipilih untuk diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, keputusan pengadilan, atau kesepakatan antara direktur lembaga.

#### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh unit administrasi yang menggerakkan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini, berbagai kepentingan bersaing satu sama lain. Beberapa implementasi kebijakan didukung oleh pelaksana, sementara yang lain mungkin menghadapi penentangan.

#### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai atau dievaluasi untuk menentukan sejauh mana keberhasilannya dalam mengatasi masalah yang ada.

Proses kebijakan yang terjadi berkenaan dengan penelitian ini berada pada proses implementasi kebijakan karena pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang dijalankan berdasarkan kebijakan berupa Keputusan Bupati Semarang No. 556/0217/2022 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Semarang. Kebijakan ini menetapkan bahwa Desa Wisata bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat-istiadat dan menjaga kelestarian alam.

#### **1.5.2.4 Implementasi Kebijakan**

Istilah implementasi kebijakan pertama kali dicetuskan oleh Laswell pada tahun 1956. Laswell membagi kebijakan publik menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana untuk dipahami. Implementasi kebijakan

adalah salah satu bagian dari proses panjang kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2014) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Keputusan kebijakan.

Menurut Gordon (dalam Keban, 2008) implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2015) mengungkapkan implementasi kebijakan berfokus pada kejadian dan kegiatan yang terjadi setelah pedoman kebijakan publik disahkan. Ini mencakup upaya untuk mengadministrasikannya ataupun menentukan apakah itu berdampak nyata pada masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap dimana rencana kebijakan diterapkan. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dampak dari kebijakan tersebut sebagai cara untuk memecahkan masalah yang ada.

#### **1.5.2.5 Stakeholders**

Freeman (dalam Oktavia & Saharuddin, 2013) menyatakan bahwa *stakeholders* merupakan individu ataupun kelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh tujuan dari suatu organisasi. Sementara itu, (Wulandari, 2020) menjelaskan bahwa *stakeholder* atau pemangku kepentingan merupakan kelompok yang sifatnya sangat luas dan

beragam, dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berbeda. Lebih lanjut, Reed (dalam Santoso et al., 2015) mengemukakan bahwa *stakeholders* merupakan seseorang maupun kelompok yang membawa maupun terkena dampak dari suatu program atau kebijakan yang sedang berjalan.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan mengenai *stakeholders* yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *stakeholders* dapat didefinisikan sebagai seorang individu atau kelompok yang dapat memberi maupun menerima pengaruh serta membawa maupun terkena dampak dari suatu program maupun kebijakan.

Kaitannya dengan keberadaan suatu program maupun kebijakan, keterlibatan *stakeholders* sangat diperlukan dalam organisasi publik dalam rangka memperlancar kegiatan pencapaian tujuan (Yuniningsih & Suwitri, 2021). *Stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang saling bergantung, baik berasal dari pemerintah maupun non pemerintah serta berperan dalam penentu keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan (Ramadani, 2022). Lebih lanjut, Ramadani (2022) pun menjelaskan bahwa ketergantungan tersebut timbul karena dalam menangani masalah publik yang semakin kompleks diperlukan kerja sama antar *stakeholders* dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing guna mencapai tujuan bersama. Stoney & Winstanley (dalam Astuti dkk, 2020) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pencapaian tujuan perlu untuk dilakukan klarifikasi posisi dan

kepentingan *stakeholders*, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kedudukan maupun peran dari *stakeholders* yang terlibat.

#### **1.5.2.6 Identifikasi *Stakeholders***

Seseorang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu disebut sebagai *stakeholders*. Menurut Hetifah (Yasmin Arafat et al., 2022), *stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh rencana atau program, dan mereka terlibat dalam program atau rencana secara langsung atau tidak langsung.

*Stakeholders* merupakan sekelompok orang atau lembaga yang memiliki perhatian maupun kepentingan dan pengaruh dalam suatu permasalahan yang ada sesuai menurut pendapat Fajri et al (dalam Maani et al., 2021). Gonsalves (dalam Maani et al., 2021) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang mempengaruhi atau terkena dampak kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan disebut sebagai pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa lembaga formal, perorangan, masyarakat, komunitas sosial ekonomi, atau lembaga dari berbagai strata masyarakat.

Menurut Maryono dalam penelitian (Handayani & Warsono, 2017), membagi *stakeholders* menjadi tiga kelompok yaitu::

1. *Stakeholder* primer, yaitu *stakeholder* yang *stakeholder* ini memiliki dampak signifikan dan kepentingan krusial terhadap suatu rencana, serta harus terlibat secara menyeluruh dalam setiap tahapannya. Mereka

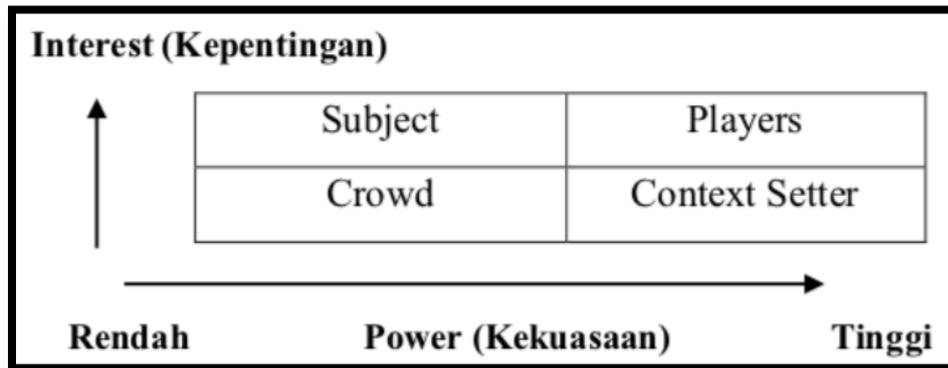
merasakan dampak langsung dan memiliki kepentingan utama dalam hal tersebut.

2. *Stakeholder* kunci, yaitu *stakeholder* yang memiliki otoritas, pengaruh, dan kepentingan yang signifikan secara hukum dalam menentukan kebijakan. (N.C. Hidayat et al., 2020).

3. *Stakeholder* sekunder, yaitu *stakeholders* yang sangat peduli dan berkontribusi untuk mencapai keberhasilan suatu proses atau pengembangan, meskipun tidak memiliki kepentingan langsung terhadap rencana tersebut. (Yasmin Arafat et al., 2022).

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) menurut Wakka dalam (Fajri et al., 2021) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu *stakeholder* primer atau utama dan *stakeholder* sekunder atau pelengkap. *Stakeholder* utama disebut juga sebagai pemangku kepentingan kunci atau *key stakeholders*. Sedangkan *stakeholder* sekunder adalah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan terhadap suatu sumber daya atau permasalahan namun kepentingan tersebut terjadi secara tidak langsung.

Teknik pemetaan dalam mengidentifikasi *stakeholders* yang dikemukakan Bryson (2004) yakni teknik pemetaan *Power Versus Interest Grid*. Teknik analisis ini fokus utamanya adalah *power* dan *interest*.



Gambar 1. 4 Matriks Analisis *Peran Stakeholders* Menurut Bryson

Sumber : Bryson (2004)

Kebutuhan dan perhatian stakeholders yang dipengaruhi oleh suatu kegiatan atau hasilnya disebut sebagai kepentingan (*interest*). Sementara itu, pengaruh atau kekuasaan (*power*) merujuk pada sejauhmana tindakan *stakeholders* dapat mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan. Menurut (LAN, 2015) *Power* dapat berasal dari akses anggaran, pendanaan, dukungan massa, atau pengendalian berbagai jenis kontrol atau sanksi misalnya kewenangan mengatur, pemberian suara/dukungan di parlemen, dsb. Sedangkan *directions of interest* melihat sejauhmana kepentingan *stakeholder* terhadap organisasi.

Menurut Bryson (2004) *power* diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki untuk membuat atau mempengaruhi suatu kebijakan, sedangkan *interest* diartikan sebagai kepentingan yang dimiliki terhadap pembuatan suatu kebijakan. Menurut (Bryson, 2004) Kepentingan (*interest*) dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, harapan *stakeholders* terhadap pelaksanaan program. Kedua, keuntungan dan manfaat yang akan mereka peroleh dari keberhasilan program kebijakan, baik itu dalam bentuk

keuntungan ekonomi, politik, maupun sosial. Ketiga, upaya *stakeholders*, yang mencakup aspirasi dan tindakan yang mereka lakukan untuk mendukung kesuksesan program.

Selanjutnya, pengaruh (*power*) setiap *stakeholder* dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, kewenangan *stakeholders*, yang mencakup kekuasaan atas suatu program serta tingkat dan posisi *stakeholders* dalam organisasi. Selain itu, yang kedua yaitu pengaruh *stakeholders* dimana berupa kemampuan *stakeholder* mempengaruhi pihak lain serta jejaring kekuasaan yang dimiliki. Ketiga, kemampuan dalam memfasilitasi implementor. *Stakeholders* dinilai mampu memfasilitasi implementor apabila mereka memiliki sumber daya.

Teknik *Power versus Interest* digunakan untuk menilai kekuasaan dan kepentingan mana saja dari pemangku kepentingan yang harus diperhitungkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Teknik ini juga melihat sikap apa yang harus dibangun, kerja sama mana yang harus didorong atau dilemahkan, dan memberikan informasi untuk meyakinkan pemangku kepentingan dalam mengubah perspektif mereka.

Matriks berdasarkan kepentingan dan pengaruh (Lihat Gambar 1.3) akan mengkategorikan *stakeholders* ke dalam empat jenis yang meliputi *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd*. Berikut penjelasannya :

a. *Subjects* merupakan *stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi memiliki pengaruh yang rendah.

b. *Key players* merupakan *stakeholders* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi.

c. *Context setters*, merupakan *stakeholders* yang memiliki pengaruh yang tinggi, tetapi memiliki sedikit kepentingan.

d. *Crowd* merupakan *stakeholders* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang identifikasi *stakeholders*, dapat disimpulkan bahwa identifikasi *stakeholders* adalah proses mengelompokkan *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *stakeholders* dari Bryson yang mengidentifikasi *stakeholders* berdasarkan kepentingan dan pengaruh.

Kepentingan (*interest*) dapat dilihat dari harapan dan manfaat yang diperoleh *stakeholders* terhadap suatu program serta upaya yang dilakukan *stakeholders* untuk memastikan program berhasil. Sedangkan pengaruh atau kekuasaan (*power*) dapat dilihat dari wewenang, pengaruh, dan kontribusi yang dimiliki *stakeholders* dalam suatu program. Identifikasi berdasarkan kepentingan dan pengaruh tersebut akan mengkategorikan *stakeholders* ke dalam empat jenis yang meliputi *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd*.

### 1.5.2.7 Peran *Stakeholders*

*Stakeholders* menurut David Viney (dalam Yuniningsih, 2019) adalah setiap orang yang terpengaruh oleh suatu keputusan dan memiliki kepentingan terhadap hasilnya, termasuk individu atau kelompok di dalam maupun di luar organisasi. Untuk menjamin kelancaran semua aktivitas, pihak berwenang sangat penting dalam struktur publik. *Stakeholders* sangat diperlukan dalam organisasi publik untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan lancar.

Nugroho (2014) mengklasifikasikan peran *stakeholders*, antara lain:

- a. *Policy creator*, *stakeholders* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, *stakeholders* yang berperan dalam mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kebijakan.
- c. Fasilitator, *stakeholders* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
- d. Implementor, *stakeholders* sebagai pelaksana kebijakan dimana didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator, *stakeholders* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya

Mengenai penjelasan tentang analisis peran *stakeholder* menurut beberapa ahli di atas, guna menganalisis Peran *Stakeholders* dalam

Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang akan menggunakan teori dari Nugroho yang mana *stakeholders* dibedakan menjadi *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

#### 1.5.2.8 Pariwisata

Para ahli mengemukakan berbagai pemahaman mengenai pariwisata, seperti Spillane (1987) yang menyatakan bahwa pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya yang bersifat sementara, baik dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok sebagai suatu usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Menurut Yoeti (dalam Yuniningsih, 2018) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu :

- a. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal;
- b. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
- c. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan
- d. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Pariwisata dalam keberjalanannya tidak terlepas dengan adanya pengembangan pariwisata. Munasef (1995) menyatakan bahwa

pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Menurut Pearce (1981) Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai “usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat”.

Dari penjabaran beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih ke suatu tempat di luar tempat tinggalnya untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kesenangan maupun kepentingan lainnya.

#### **1.5.2.9 Desa Wisata**

Nuryanti dalam Sidiq, et.al (2017) menyebutkan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk keintegrasian dari atraksi, akomodasi, dan penyediaan fasilitas pendukung yang keberadaannya merupakan satu kesatuan dari adat maupun norma sosial masyarakat yang berlaku. Ditegaskan pula akomodasi yang dimaksud adalah sebagian atau beberapa dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/unit-unit yang sedang dan akan dikembangkan yang disesuaikan dengan karakteristik penduduk setempat. Sedangkan untuk atraksi adalah seluruh aktivitas keseharian penduduk lokal yang memungkinkan adanya integrasi dengan wisatawan yang datang berkunjung ke desa tersebut sebagai partisipan aktif, seperti adanya kursus tari, bahasa, lukis, dan hal spesifik lainnya.

Desa wisata idealnya dikelola secara mandiri berbasis masyarakat, dengan modal dan pengelolaan dari masyarakat di desa wisata tersebut. Desa wisata ini merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Made Heny, dkk, 2013).

Pada dasarnya, tipologi desa wisata didasarkan atas karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori menurut (Andriani, 2015), yaitu :

1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal (adat tradisi kehidupan masyarakat, artefak budaya, dsb) sebagai daya tarik wisata utama, yaitu wilayah pedesaan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat pedesaan, baik terkait dengan aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktivitas lainnya.
2. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (pegunungan, agro/perkebunan dan pertanian, pesisir-pantai, dsbnya), yaitu wilayah pedesaan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga desa tersebut memiliki

potensi keindahan *view* dan lanskap untuk menarik kunjungan wisatawan.

3. Desa wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama, yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan daya Tarik yang merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/lanskap).
4. Desa wisata berbasis keunikan aktivitas ekonomi kreatif (industri kerajinan, dsb) sebagai daya tarik wisata utama, yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktivitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas.

Pearce dalam Arida (2017:3) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Gumelar (2010:5) mengatakan tujuan pengembangan kawasan desa wisata adalah :

- a. Mengenali jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk setempat.

- b. Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.
- c. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya, dan agar mereka, mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
- d. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
- e. Mengembangkan produk wisata desa.

Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi dan daya tarik yang dapat dimanfaatkan menjadi suatu objek wisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya serta menjadikan desa tersebut menjadi lebih berkembang.

#### **1.5.2.10 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata**

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata ditinjau berdasarkan nilai, komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan. Hal tersebut sesuai dalam penelitian Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau (2020). Penjabaran dari keempat faktor ialah sebagai berikut :

## 1. Nilai

Menurut Steeman (2013) nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, titik, tolak, dan tujuan hidup. Menurut Linda dan Riochard Eyre (1997) nilai adalah standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan bagaimana seseorang bertindak. Nilai-nilai menjadi faktor penting yang dijadikan sebagai pedoman guna mencapai keberhasilan pengembangan pariwisata (Destiana et al, 2020). Menurut Wart dalam (Hamida, 2022) nilai terbagi menjadi lima, yaitu :

### a. Nilai Individu

Nilai individu adalah sesuatu hal yang dijadikan pedoman bagi individu untuk berkegiatan. Nilai yang dipercaya Individu akan saling bersaing dan memiliki banyak perbedaan.

### a. Nilai Profesional

Nilai profesional merupakan prinsip dasar etika dalam praktik dan pedoman dalam membuat sebuah keputusan. Nilai profesional merupakan faktor penting dalam memiliki komitmen profesional. Nilai profesional dapat dikembangkan dengan menyelenggarakan pelatihan untuk kelompok kepentingan dan organisasi profesi.

### b. Nilai Organisasi

Struktur dan budaya organisasi sering menyelimuti kepentingan organisasi dalam merumuskan kebijakan. Apabila melakukan suatu perubahan, memungkinkan terjadinya konflik. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi nilai organisasi dalam membawa kepentingan

publik sehingga diperlukan pemimpin yang menerapkan revolusi manajemen dan *Total Quality Management*.

c. Nilai Hukum

Nilai hukum tercermin dalam konstitusi negara. Perubahan konstitusi dapat mengubah berbagai kebijakan. Prosedurnya, konstitusi mengatur berbagai kebijakan agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

d. Nilai Kepentingan Publik

Nilai kepentingan publik adalah sesuatu hal yang dibawa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kepentingan publik harus menjadi dasar jejaring kebijakan publik. *Stakeholders* harus meninggalkan kepentingan pribadi dan memegang teguh kepentingan publik. Kepentingan publik sering diintervensi oleh faktor politik, sehingga kepentingan publik terkesan samar, penuh konflik, dan *silent*.

2. Komunikasi

Komunikasi yang efektif menjadi salah satu pendukung dalam hubungan kerjasama diantara *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata (Destiana et al, 2020). Komunikasi berkaitan dengan penyebaran informasi program yang akan dilaksanakan *stakeholders* untuk mencapai efisiensi pengembangan pariwisata. Menurut Sutardji dalam (Ginting et al., 2023) indikator komunikasi yang efektif yaitu dilihat dari pemahaman, pengaruh pada sikap, serta hubungan yang semakin baik.

3. Kepercayaan

Wayers (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi *stakeholders* bergantung pada hubungan yang saling percaya atau kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud ialah kepercayaan dari masing-masing aktor dalam menjalin hubungan dengan aktor lain guna mencapai tujuan atau kepentingan yang sama. Kepercayaan dalam pengembangan pariwisata dibangun dengan konsensus kolaboratif dan inklusif yang mempertimbangkan dimensi kepercayaan. Kepercayaan dipupuk dengan komitmen, saling bertukar informasi, serta mengkonsolidasikan hubungan antar pihak. Terdapat empat indikator kepercayaan menurut Maharani dalam (Ardianto et al., 2020) , yaitu : keandalan, kejujuran, kepedulian, dan kredibilitas.

#### 4. Kebijakan

Pengembangan pariwisata perlu didukung oleh regulasi yang mengatur penyelenggaraan wisata. Kebijakan pemerintah menjadi landasan *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata (Judisseno, 2017), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan agar pihak di luar pemerintah memiliki acuan dalam pengembangan pariwisata. Kebijakan digunakan untuk memantau keberjalanan pengembangan pariwisata.

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Peran pemangku kepentingan dalam Pengembangan Desa Wisata Lerep adalah suatu hal yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep sesuai dengan kepentingan tertentu. *Stakeholders* meliputi individu atau kelompok yang saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tujuan organisasi, proyek yang sedang dilakukan, ataupun kebijakan.

Analisis *stakeholders* adalah usaha untuk memahami mengenai siapa saja yang ikut andil dalam pengembangan Desa Wisata Lerep serta memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Identifikasi *stakeholders* dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kepentingan dan pengaruh. Kepentingan (*interest*) dapat diartikan sebagai kebutuhan ataupun harapan *stakeholders* terhadap suatu program. Sedangkan pengaruh atau kekuasaan (*power*) merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh *stakeholders* yang dapat menentukan seberapa besar pengaruh dari tindakan yang dilakukan.

Kepentingan (*interest*) dapat dilihat dari pertama, harapan *stakeholders* terhadap pelaksanaan program. Kedua, keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh *stakeholders* dari keberhasilan program kebijakan. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa keuntungan ekonomi, politik, maupun sosial. Ketiga, upaya *stakeholders* yaitu berupa aspirasi dan upaya yang mereka lakukan dalam mendukung keberhasilan program.

Selanjutnya, pengaruh (*power*) dari setiap *stakeholders* dapat dilihat dari pertama kewenangan *stakeholders*. Kewenangan *stakeholders* dilihat dari

adanya kekuasaan terhadap suatu program serta derajat dan level *stakeholders* dalam organisasi. Selain itu, yang kedua yaitu pengaruh *stakeholders* dimana berupa kemampuan *stakeholders* mempengaruhi pihak lain serta jejaring kekuasaan yang dimiliki. Ketiga, kemampuan dalam memfasilitasi implementor. *Stakeholders* dinilai mampu memfasilitasi implementor apabila mereka memiliki sumber daya. Identifikasi berdasarkan kepentingan dan pengaruh tersebut akan mengkategorikan *stakeholders* ke dalam empat jenis yang meliputi *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd*:

1. *Key Players* : *Stakeholders* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
2. *Subjects* : *Stakeholders* yang memiliki kepentingan tinggi, tetapi pengaruh rendah.
3. *Context Setters* : *Stakeholders* memiliki pengaruh tinggi, tetapi kepentingan rendah.
4. *Crowd* : *Stakeholders* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah.

Selanjutnya, peran *stakeholder* merupakan kewajiban dan hak yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat lima peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep, yaitu :

1. *Policy creator* : *Stakeholders* yang berperan mengambil dan menentukan kebijakan.

2. Koordinator : *Stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain.
3. Fasilitator : *Stakeholders* yang berperan memfasilitasi kelompok sasaran.
4. Implementer : *Stakeholders* yang melaksanakan kebijakan.
5. Akselerator : *Stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi pada pelaksanaan program.

Faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang terdiri dari empat faktor, yaitu :

1. Nilai : Nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam mencapai tujuan hidup. Nilai terdiri dari beberapa macam, yaitu :
  - a. Nilai individu : Nilai yang dimiliki individu.
  - b. Nilai profesional : Prinsip dasar etika dalam praktik dan pedoman membuat keputusan pengembangan pariwisata.
  - c. Nilai organisasi : Struktur dan budaya organisasi atau *stakeholders* yang digunakan dalam mencapai kepentingannya masing-masing.
  - d. Nilai hukum : Nilai yang tercantum dalam konsitusi negara.
  - e. Nilai kepentingan public : Nilai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Komunikasi : Komunikasi berkaitan dengan penyebaran informasi untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata. Indikator komunikasi dapat ditinjau dari pemahaman, pengaruh pada sikap, serta hubungan yang semakin baik.

3. Kepercayaan : Kepercayaan dari masing-masing aktor dalam menjalin hubungan dengan aktor lain guna mencapai tujuan atau kepentingan yang sama, yaitu pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. Indikator kepercayaan terdiri dari : keandalan, kejujuran, kepedulian, dan kredibilitas.
4. Kebijakan : Kebijakan pemerintah yang menjadi landasan *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep.

### **1.7 Argumen Penelitian**

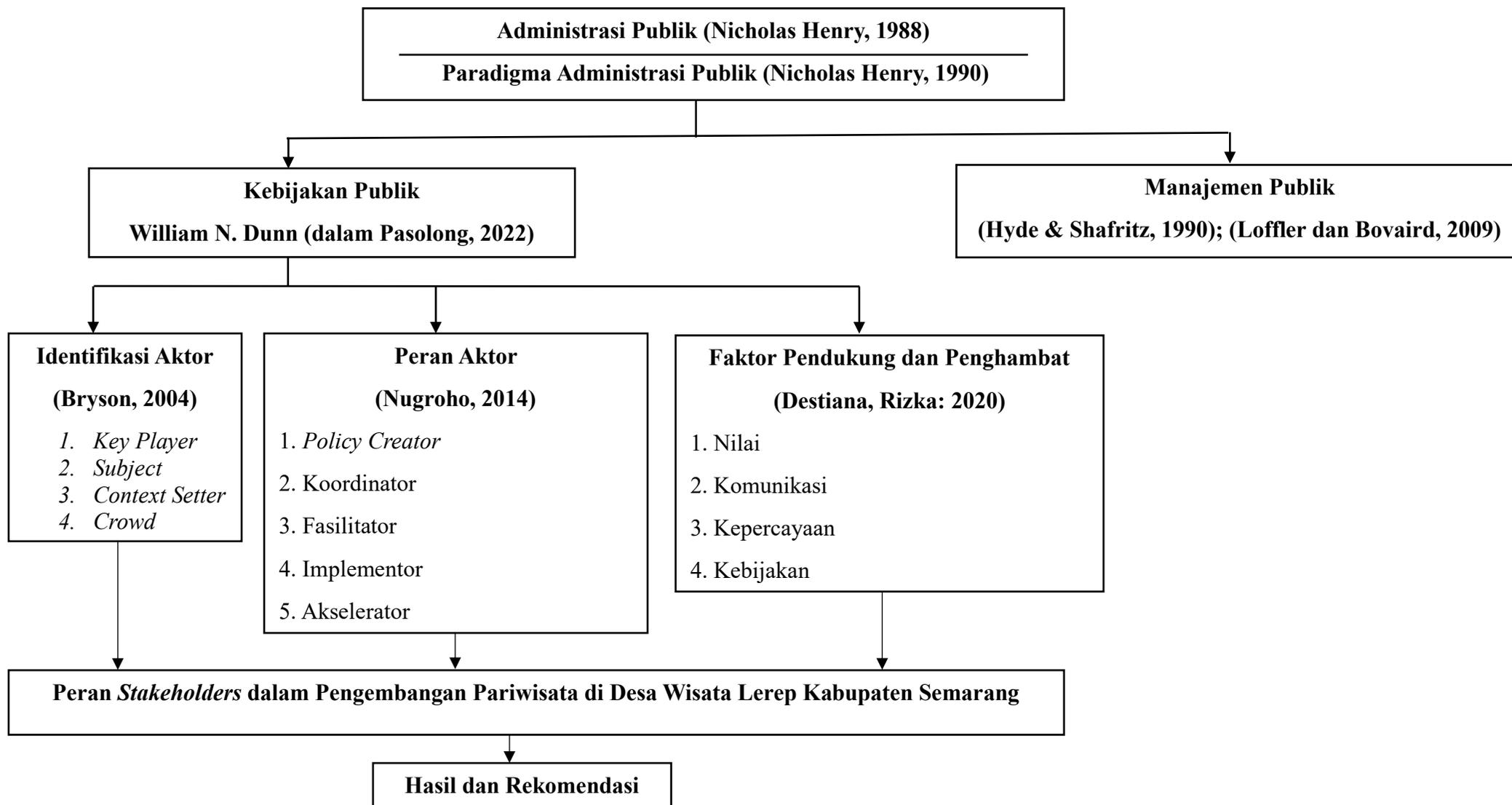
Keterlibatan *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata adalah salah satu variabel yang penting dalam paradigma Administrasi Publik sebagai *governance*. Paradigma ini mengaskan bahwa pusat perhatian administrasi tidak hanya mengandalkan peran pemerintah tetapi juga melibatkan berbagai *stakeholders* di luar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah publik (Nicholas Henry, 1990).

Permasalahan publik diatasi melalui kebijakan publik. Kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan pemerintah maupun yang tidak dilakukan (Dye, 1981). Kebijakan publik melibatkan berbagai proses, meliputi proses penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Wiliam Dunn dalam Subarsono, 2015).

Pada proses implementasi kebijakan tercipta hubungan yang saling berkaitan baik dari dalam maupun luar pemerintah, hubungan ini disebut jejaring kebijakan (Howlett dan Ramesh, 1995). Guna memperlancar kegiatan pengembangan pariwisata, *stakeholders* dapat dikategorikan dengan

mengidentifikasi kepentingan dan pengaruhnya. Kategori tersebut meliputi, *subjects, keyplayers, contest setter,* dan *crowd* (Bryson, 2004). Keterlibatan stakeholders dalam menjalankan kegiatannya dapat diketahui dengan analisis peran *stakeholders* yang terbagi menjadi empat, yaitu sebagai *policy creator, coordinator, facilitator,* dan *implementer* (Riant Nugroho, 2014). Pada pengembangan pariwisata sering kali ditemukan permasalahan walaupun sudah melibatkan stakeholders. Permasalahan yang terjadi dapat dianalisis menggunakan faktor nilai, komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan (Destiana Rizka, 2020).

## 1.8 Kerangka Pikir Teoritis



Gambar 1. 5 Kerangka Pikir Teoritis

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti akan menggali informasi dari individu maupun kelompok yang terlibat serta mengajukan pertanyaan, mencari data spesifik, serta menganalisisnya secara induktif, dan juga menafsirkan makna dari data-data tersebut (Cresswell, 2014). Pasolong (2013) menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe penelitian kualitatif, yaitu penelitian deskriptif, aksplanatori, dan eksploratif. Berdasarkan ketiga tipe tersebut, penulis memilih menggunakan tipe deskriptif. Hal tersebut dipilih karena peneliti ingin menggambarkan serta melakukan analisis terkait *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang serta mendeskripsikan peran-peran yang dilakukannya. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis mampu memberikan gambaran umum dalam penelitian terkait fenomena yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian dalam menetapkan tujuan dan objek akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti perlu melakukan penelitian di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang.

### 1.9.3 Fenomena Penelitian

**Tabel 1. 5 Fenomena Penelitian**

<b>Fenomena</b>	<b>Komponen</b>	<b>Gejala yang diamati</b>
Identifikasi Stakeholders	<i>Key Player</i>	1. Kepentingan
	<i>Subject</i>	a) Keterlibatan <i>stakeholder</i>
	<i>Context Setter</i>	b) Manfaat yang didapat <i>stakeholder</i>
	<i>Crowd</i>	c) Harapan/Ketergantungan
Peran Stakeholders		2. Pengaruh
		a) Wewenang yang dimiliki <i>stakeholder</i>
		b) Kontribusi fasilitas yang diberikan <i>stakeholder</i>
		c) Keterlibatan SDM
		d) Dukungan anggaran
Peran Stakeholders	<i>Policy Creator</i>	1. Tugas dan fungsi <i>stakeholder</i>
		2. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i>
		3. Peran <i>stakeholder</i> dalam penentuan arah pengembangan pariwisata
	Koordinator	1. Tugas dan fungsi <i>stakeholder</i>
		2. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i>
Peran Stakeholders		3. Peran <i>stakeholder</i> dalam penentuan arah pengembangan pariwisata
	Fasilitator	1. Tugas dan fungsi <i>stakeholder</i>
		2. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i>
		3. Peran <i>stakeholder</i> dalam penentuan arah pengembangan pariwisata
	Implementor	1. Tugas dan fungsi <i>stakeholder</i>
Peran Stakeholders		2. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i>
		3. Peran <i>stakeholder</i> dalam penentuan arah pengembangan pariwisata
	Akselerator	1. Tugas dan fungsi <i>stakeholder</i>
		2. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i>
		3. Peran <i>stakeholder</i> dalam penentuan arah pengembangan pariwisata
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	Nilai	1. Nilai individu, hubungan kerjasama <i>stakeholders</i> dalam pengembangan Desa Wisata Lerep
		2. Nilai organisasi, kemampuan dan komitmen <i>stakeholders</i> dalam melaksanakan kebijakan
	Komunikasi	1. Tingkat frekuensi komunikasi antar <i>stakeholders</i>
		2. Kualitas hubungan <i>stakeholders</i> dimana saling memahami tujuan, visi, dan misi dari suatu kebijakan.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	Kepercayaan	1. <i>Stakeholders</i> terkait aktif berkolaborasi maupun berpartisipasi dalam suatu kebijakan yang dapat membangun kepercayaan
		2. Kemampuan <i>stakeholders</i> dalam mematuhi kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	Kebijakan	<i>Stakeholders</i> mampu menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan kebijakan atau aturan yang berlaku.

#### 1.9.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau sering juga disebut dengan narasumber adalah pihak- pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang memiliki informasi akurat yang dapat ditelusuri kembali ke fakta-fakta di lapangan. Subjek penelitian sering disebut dengan narasumber atau orang yang memberikan informasi. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian juga dapat disebut sebagai informan. Subjek penelitian ini dipilih secara *purposive*, tetapi apabila di lapangan dibutuhkan informasi yang lebih dalam maka informan akan dipilih secara *snowball*.

- a. Teknik *purposive*, merupakan teknik penentuan narasumber atau informan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.
- b. Teknik *snowball*, merupakan teknik penentuan narasumber atau informan yang sifatnya bergulir sesuai dengan arahan dari informan yang ditentukan melalui teknik *purposive*.

*Purposive sampling* digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel secara sengaja, dimana informan pertama yang dituju adalah Pemerintah Desa Lerep. Kemudian, dilanjutkan dengan penerapan teknik *snowball sampling* dimana akan bergulir sesuai dengan arahan dari informan yang telah diwawancara.

### 1.9.5 Jenis Data

Pada penelitian kualitatif ini, jenis data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif yang berupa rangkaian kata atau frase yang dapat menggambarkan peristiwa atau fenomena yang ditemukan dalam penelitian, bukan berupa angka- angka. Lofland dan Lofland (2009) menjelaskan tentang sumber dari data kualitatif yaitu kata-kata, dokumen, dan informasi lainnya. Berhubungan juga dengan hal tersebut jenis data dibagi menjadi kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan lain sebagainya. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata atau verbal bukan berupa angka atau numerik. Selain itu, data kualitatif juga dapat diartikan sebagai data yang berupa rangkaian kata, frasa, atau pernyataan yang mampu menggambarkan fenomena dalam pelaksanaan penelitian.

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Kata-kata dan Tindakan

Sumber data utama berasal dari kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan adalah hasil dari gabungan kegiatan yang dilihat, didengar, dan dijawab. Pada penelitian ini, peneliti harus memperhatikan peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang. Peneliti juga harus dapat mewawancarai orang-orang yang dijadikan informan guna mendapatkan informasi mengenai keadaan pariwisata di desa tersebut. Pada kegiatan

wawancara, peneliti akan bertanya dan mendengarkan berbagai informasi dari informan, sehingga dapat dijadikan data untuk penelitian.

b. Sumber Tertulis

Moleong (2010) menjelaskan bahwa dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Pada penelitian ini, sumber tertulis berasal dari beberapa buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi. Dokumen resmi didapatkan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Lerep, dan berbagai instansi yang terkait.

c. Foto

Foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif yang hasilnya dianalisis secara induktif (Moleong, 2010). Foto yang dihasilkan oleh peneliti dan waktu pengambilan juga akan mempengaruhi keadaan. Melalui foto, peneliti dapat mengetahui kondisi Desa Wisata Lerep secara lebih jelas.

d. Data Statistik

Penelitian kualitatif menggunakan data statistik yang mampu digunakan sebagai sumber data tambahan. Data statistik dapat memberikan gambaran kecenderungan subjek pada latar penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data statistik sebagai data pendukung dalam melakukan analisis, yang didapatkan melalui Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Semarang, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Desa Lerep, dan berbagai instansi terkait lainnya.

### **1.9.6 Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus memiliki sumber data yang konkret agar data-data dan informasi yang diberikan benar adanya dan sah. Menurut pendapat Lofland dan Lofland (1984) sumber utama data di dalam penelitian terkhususnya penelitian kualitatif bersumber dari kata-kata dan juga tindakan, selebihnya diambil dari data tambahan yang dimiliki oleh peneliti seperti dokumen maupun foto. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu :

#### **a. Sumber Data Primer**

Pengumpulan secara langsung yang berasal dari akar permasalahan atau akar pertama disebut dengan sumber data primer. Data primer dapat diperoleh melalui kegiatan wawancara secara langsung dengan narasumber yang memiliki informasi mengenai peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu dapat diperoleh dari wawancara dengan pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Lerep, POKDARWIS Desa Lerep, masyarakat Desa Lerep, dan lain-lain.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang memiliki kaitan dengan judul yaitu Peran *Stakeholders* dalam pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lerep. Pada penelitian ini, tinjauan pustaka, dokumen, penelitian terdahulu, dan jurnal merupakan sumber data sekunder. Beberapa data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, data dari Badan Pusat Statistik, data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, serta artikel jurnal dan berita lain yang sesuai dengan topik penelitian.

#### **1.9.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

a. Wawancara

Peneliti menyusun pertanyaan secara urut dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara terstruktur, sehingga dalam pengumpulan data terlihat lebih rapi dan lengkap, sehingga memudahkan peneliti dalam mencari dan mengolah data. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada Pegawai Dinas Pariwisata yang menangani tentang Desa Wisata, Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Ketua POKDARWIS, masyarakat sekitar Desa Wisata Lerep.

b. Observasi

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang guna melihat bagaimana keadaan di lapangan.

c. Dokumentasi

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data pendukung berbentuk arsip atau dokumen yang dikaji dan diteliti. Hasil wawancara akan dikatakan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto ataupun karya tulis akademik.

### **1.9.8 Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi studi pustaka dan transkrip wawancara secara langsung. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) terdapat tiga alur kegiatan dalam suatu analisis yang terjadi secara bersama-sama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Merupakan kegiatan untuk mencatat suatu hal yang perlu dicatat lebih rinci dan teliti dari banyaknya jumlah laporan. Reduksi data juga berarti membuat rangkuman, memilih beberapa hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian yang singkat, berbentuk bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan

Kesimpulan yang dikemukakan di awal sifatnya masih sementara dan nantinya akan berubah menjadi kesimpulan yang kuat dan kredibel apabila ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan di awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data, maka kesimpulan di awal tersebut adalah kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dalam proses pengolahan data yaitu perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga menggunakan *software* ATLAS.ti untuk analisis data. Peneliti mengumpulkan data-data yang terdiri dari deskripsi beserta uraiannya, lalu di susun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis. Selanjutnya dilakukan usaha guna menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

### **1.9.9 Kualitas Data**

Penelitian kualitatif mempunyai ukuran kualitas yang baik. Standar kualitas yang baik membuktikan bahwa hasil dari penelitian secara kualitatif

telah mempunyai kepercayaan yang besar sesuai dengan yang ada di lapangan. Validitas merupakan kekuatan data yang berdasar pada kepastian keakuratan. Strategi kualitas data menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2014) antara lain sebagai berikut.

a. Mentrangulasi berbagai sumber data yang beragam dengan memeriksa bukti yang bersal dari sumber data tersebut dan kemudian menggunakannya untuk menentukan dan membentuk tema. Selanjutnya, sumber data dan perspektif dari partisipan akan membentuk tema sehingga dapat meningkatkan validitas penelitian.

b. Penerapan *member checking* yang bertujuan untuk melihat akurasi hasil penelitian.

c. Memberikan deskripsi yang padat dan kaya mengenai hasil penelitian, setidaknya suatu penelitian harus dapat memberikan gambaran mengenai setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman partisipan.

d. Mengklarifikasi bias yang kemungkinan muncul dalam penelitian penulis.

e. Memaksimalkan waktu saat berada di lapangan atau loasi penelitian.

Pada penelitian digunakan teknik triangulasi oleh peneliti. Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa validitas data dengan dimanfaatkannya sesuatu hal (Moloeng,2017:330).

#### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk melakukan perbandingan dan pengecekan ulang terhadap kepercayaan suatu informasi yang didapatkan dari beberapa sumber.

#### b. Triangulasi Teknik

Data yang diperoleh dengan wawancara nantinya akan dicek juga dengan observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka. Apabila data yang dihasilkan berbeda-beda, maka penulis akan berdiskusi lebih lanjut dengan informan atau sumber data yang lain.

#### c. Triangulasi Waktu

Penulis dalam rangka pengujian kualitas data dapat dilakukan dengan pengecekan hasil wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apabila kemudian ditemukan perbedaan data, maka penulis akan mengumpulkan data lagi, hingga menemukan kepastian data.

Dari beberapa triangulasi di atas, penelitian ini melakukan pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Terkait dengan pengembangan Desa Lerep, triangulasi sumber data untuk menguji keabsahan yang didapatkan dari pemerintah, pokdarwis, masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Hal tersebut digunakan peneliti untuk memastikan kualitas data.